

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak normalisasi hubungan bilateral pada tahun 1992, Korea Selatan-Tiongkok telah memiliki ruang untuk meningkatkan hubungan kemitraan. Berdasarkan data pada tahun 2015, Tiongkok merupakan negara utama bagi Korea Selatan dalam perdagangan bilateral, dengan nilai ekspor mencapai 137 miliar USD.¹ Kedekatan dua negara berlanjut pada bidang keamanan, keterlibatan Tiongkok pada *Six Party Talks* dipandang Korea Selatan sebagai peluang agar Tiongkok mendukung denuklirisasi Korea Utara yang menjadi ancaman stabilitas keamanan di kawasan.² Akan tetapi, hubungan bilateral akan menghadapi tantangan disaat adanya ancaman eksistensial bagi negara di tengah upaya mencapai kepentingan nasional.³

Keagresifan Korea Utara dalam melakukan uji coba peledakan ICBM (*Intercontinental Ballistic Missile*) telah membawa babak baru bagi dinamika hubungan di kawasan Asia Timur. Menghadapi hal tersebut, Korea Selatan bersama Amerika Serikat menempatkan sistem keamanan anti rudal balistik, THAAD (*Terminal High Altitude Area Defense*) pada tahun 2016.⁴ Selain itu, ancaman Korea Utara dalam uji coba rudal balistik turut menjadi motif keputusan Korea Selatan untuk

¹ WITS (World Integrated Trade Solutions), "Republic of Korea Trade Summary 2015," *Korea, Rep. Top 5 Export and Import Partners 2015*, diakses pada 17 February 2023 melalui <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/KOR/Year/2015/Summarytext>.

² Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea, *The Outcome of the Six-Party Talks*, 2003.

³ Alice Pannier, "Bilateral Relations," in *Global Diplomacy: An Introduce to Theory and Practice*, (Paris: The Sciences Po in International Relations Political Economy, 2020), 19–33,.

⁴ U.S. Department of Defense, *Republic of Korea and the United States Make Alliance Decision to Deploy THAAD to Korea*, 2016.

memaksimalkan kemitraannya bersama Amerika Serikat dan Jepang dalam bidang keamanan terutama pertahanan misil.⁵

Menanggapi keputusan Korea Selatan mengenai THAAD, Tiongkok menunjukkan sikap penolakan. Dengan pancaran radius 1.000 kilometer,⁶ Tiongkok menganggap THAAD akan mengancam eksistensi keamanan negara dan kawasan.⁷ Kemarahan Tiongkok merambah pada pemberian pembalasan ekonomi terhadap Korea Selatan. Akibat dari pembalasan ekonomi, Korea Selatan diperkirakan telah mengalami kerugian hingga 7.3 miliar USD.⁸ Sebaliknya, tindakan Tiongkok mengundang respon negatif dari publik Korea Selatan yang ditunjukkan melalui *Sense of Favorability South Korea to China*, *Pew Research Center* 2017 bahwa terjadi penurunan angka 61% menjadi 34% dalam rentang waktu satu tahun, sehingga menghilangkan kepercayaan publik Korea Selatan untuk melakukan kemitraan dengan Tiongkok.⁹

Setelah melalui ketegangan dalam menghadapi kontroversi, Korea Selatan berinisiasi untuk meredam sentimen pasca polemik THAAD.¹⁰ Berbagai upaya diplomasi dilakukan, Tiongkok mengakhiri pembalasan ekonomi dengan ditetapkannya kesepakatan *Three No's*. Perisinggungan kepentingan seperti ini kerap

⁵ Ministry of Foreign Affairs of Japan, *Joint Statement Following the Japan-U.S.-ROK Trilateral Ministerial Meeting in New York*, 2016, diakses melalui https://www.mofa.go.jp/a_o/na/page1e_000100.html.

⁶ Missile Defence Advocacy Alliance, *Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)*, 2022, diakses pada <https://missiledefenseadvocacy.org/defense-systems/terminal-high-altitude-area-defense-thaad/>.

⁷ Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, *Zhang Yesui: China Opposes Deployment of THAAD Missile Defense System in ROK*, 2016,

⁸ Korea Herald, "Korea's Economic Growth May Slow Down on THAAD Impact," 2017, diakses melalui <https://m.koreaherald.com/view.php?ud=20170308000578>.

⁹ Laura Silver, Christine Huang, and Laura Clancy, "How Global Public Opinion of China Has Shifted in the Xi Era," *Pew Research Center*, 2022,

¹⁰ Adam Taylor, "South Korea and China Move to Normalize Relations after THAAD Dispute," *The Washington Post*, terakhir diubah pada 2017, diakses pada 31 Oktober 2022.

dialami Tiongkok dengan beberapa negara lain di kawasan Asia Timur, sehingga mampu memperkeruh situasi global.

Asia Timur kerap mengalami pergolakan geopolitik hingga menjadi arena pertarungan hegemoni. Sengketa teritorial di kawasan Asia Timur antara Tiongkok dan Korea Selatan dalam menghadapi Jepang berimbas pada bangkitnya sentimen akan permasalahan masa lalu. Disaat sengketa belum terselesaikan, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengunjungi Kuil Yasukuni hingga dikritik bersamaan oleh Tiongkok dan Korea Selatan bahwa Jepang telah meromantisasi kejahatan kolonialisme.¹¹ Keretakan hubungan Korea Selatan-Jepang direspon Amerika Serikat melalui desakan terhadap Jepang untuk segera berdamai dengan Korea Selatan atas tindakannya yang memicu sentimen tinggi. Dengan tekanan tersebut, Jepang dan Korea Selatan menyelesaikan permasalahan pada tahun 2015.¹²

Selain itu, Tiongkok juga terlibat pada konflik kedaulatan dengan Taiwan. Upaya Tiongkok merangkul kembali Taiwan dalam rangka mempertahankan kepentingan dasar dihadapkan dengan kehadiran kekuatan penyeimbang (*rebalancing*). Amerika Serikat menyatakan posisinya untuk mendukung kedaulatan Taiwan serta membuka akses perdagangan senjata sehingga memperkuat posisi Taiwan.¹³ Hal ini muncul akibat Amerika Serikat telah lama aktif mempertahankan kehadiran politik yang tangguh di Asia melalui strategi “*rebalance*” sejak

¹¹ Park Hahn-Kyu, “The China-Japan-South Korea Trilateral Summit: Realpolitik or Liberal Peace?,” in *China-Japan Relations in the 21st Century: Antagonism Despite Interdependency* (Singapore: Palgrave Macmillan, 2017), 291–317.

¹² Ministry of Foreign Affairs of Japan, *Announcement by Foreign Ministers of Japan and the Republic of Korea at the Joint Press Occasion*, 2015, https://www.mofa.go.jp/a_o/na/kr/page4e_000364.html.

¹³ U.S. Defense Security Cooperation Agency, *Taipei Economic and Cultural Representative Office (TECRO) in the United States*, 2017, https://www.dsca.mil/sites/default/files/mas/tecro_16-67.pdf.

pemerintahan Barack Obama dalam mengelola strategi geopolitik.¹⁴ Dengan tantangan geopolitik yang dihadapi, Tiongkok pada dasarnya telah membentuk konsep kebijakan yang mendukung kemitraan guna mencapai perdamaian sehingga potensi konflik terutama dengan negara tetangga dapat dihindari.

Dalam konteks “*the Rise of China*”, Tiongkok sejatinya membutuhkan situasi lingkungan internasional yang mendukung dalam operasionalisasi kepentingan nasional. Prinsip kebijakan luar negeri Tiongkok dalam mencapai tujuan tersebut telah diinisiasikan sejak pemerintahan Jiang Zemin melalui “*New Security Concept*”. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan kesetaraan dalam kemitraan global.¹⁵ Selain itu, Xi Jinping membawa perubahan lebih lanjut bagi Tiongkok yang dinilai lebih proaktif melalui prinsip “*Peaceful Rise 2.0*” mengatasi persepsi negatif global atas “ancaman Tiongkok”.¹⁶ Melalui Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi menyatakan bahwa akan memaksimalkan hubungan kerjasama regional melalui “*Neighbourhood Diplomacy*” dalam rangka menjaga hubungan baik dengan negara tetangga.¹⁷ Dengan demikian, di tengah rusaknya hubungan Tiongkok di kawasan Asia Timur, Tiongkok memproyeksikan arah kebijakan luar negeri sebagaimana yang telah dipaparkan guna mempromosikan kemitraan global dalam mencapai lingkungan internasional yang damai.

¹⁴ US Department of Defense, *Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense*, 2012, hal 2, https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/dod/defense_guidance-201201.pdf.

¹⁵ Akio Takahara, “The Rise of China and Its Neighborhood Diplomacy: Implications for Japanese Foreign Policy,” *Journal of Contemporary East Asia Studies* 1, no. 1 (2012): 47–71.

¹⁶ Jian Zhang, “China’s New Foreign Policy under Xi Jinping: Towards ‘Peaceful Rise 2.0’?,” *Global Change, Peace and Security* 27, no. 1 (2015): 5–19, <http://dx.doi.org/10.1080/14781158.2015.993958>.

¹⁷ Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, *Embark on a New Journey of China’s Diplomacy*, 2013.

1.2 Rumusan Masalah

Hubungan bilateral Korea Selatan-Tiongkok telah menghadapi babak baru pasca munculnya polemik THAAD yang merusak hubungan keduanya. Setelah munculnya fenomena pembalasan ekonomi yang berdampak pada turunnya nilai perdagangan bilateral dan kepercayaan publik Korea Selatan, Tiongkok secara terbuka memperbaiki hubungan bilateral melalui kesepakatan *Three No's* tahun 2017. Apabila melihat fenomena yang terjadi, terdapat beberapa hambatan dan peluang dalam menjaga kepentingan nasional Tiongkok terkait pecahnya polemik THAAD dengan Korea Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis motivasi Tiongkok dalam memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAAD. Pilihan diksi motivasi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai bentuk faktor-faktor pendorong tindakan Tiongkok dalam merumuskan pilihan negara melalui kebijakan luar negeri untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAAD. Selain itu, pilihan diksi polemik digunakan sebagai penggambaran studi kasus yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan dua aktor yaitu Tiongkok dan Korea Selatan terkait penempatan THAAD hingga menghasilkan polemik tersebut.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dideskripsikan, maka penulis mengidentifikasi pertanyaan penelitian “Apa motivasi Tiongkok dalam memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAAD?”

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis motivasi Tiongkok dalam memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAAD.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan pembaca dapat mendapatkan manfaat, di antaranya:

1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah referensi literatur terkait kebijakan luar negeri Tiongkok, terkhususnya pada perbaikan hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAAD serta menambah referensi pada kajian kawasan Asia Timur.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pemangku kepentingan nasional seperti aktor negara sebagai penggambaran analitis dalam analisis kebijakan luar negeri terhadap motivasi Tiongkok dalam perbaikan hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAAD.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, dibutuhkan beberapa referensi melalui tinjauan pustaka terhadap beberapa artikel jurnal yang dapat mempermudah peneliti dalam memperoleh informasi guna menjawab pertanyaan penelitian. Referensi pertama yang peneliti gunakan adalah artikel jurnal dengan judul “*Resetting the South Korea-China Relationship: the THAAD Controversies and Their Aftermath*” oleh Han Sukhee pada tahun 2019 dalam *The Korean Journal of Defense Analysis*.¹⁸ Tulisan ini peneliti

¹⁸ Sukhee Han, “Resetting the South Korea–China Relationship: The THAAD Controversies and Their Aftermath,” *Korean Journal of Defense Analysis* 31, no. 4 (2019): 539–557.

gunakan dalam melihat bagaimana polemik THAAD terjadi, sehingga berdampak pada rusaknya hubungan bilateral Korea Selatan-Tiongkok sehingga diperlukan upaya normalisasi agar mengembalikan kemitraan bilateral kedua negara.

Han mendeskripsikan bagaimana upaya pengembalian hubungan bilateral Korea Selatan-Tiongkok melalui analisisnya terhadap beberapa indikator, di antaranya adalah bagaimana sejarah hubungan Tiongkok-Korea Selatan yang dimulai dengan adanya normalisasi bilateral pada tahun 1992 yang secara bertahap memberikan peluang bagi kedua negara untuk menjalankan kerjasama pada beberapa bidang seperti perekonomian dan keamanan, namun akibat dari penempatan THAAD di Korea Selatan memicu penolakan dari Tiongkok yang telah menjadi mitra kerjasama Korea Selatan. Kekecewaan Tiongkok ditunjukkan dengan memberikan pembalasan ekonomi terhadap Korea Selatan dalam bidang perdagangan seperti Lotte Mart yang 90% ditutup di Tiongkok, serta pelarangan aktivitas wisata asal Tiongkok ke Korea Selatan. Boikot yang dilakukan Tiongkok turut merambah pada dunia hiburan dengan dilarangnya penayangan konten hiburan dari Korea Selatan seperti K-Drama, K-Pop, dan acara televisi. Sebagai akibat dari pembalasan ekonomi tersebut, Korea Selatan mengalami kerugian yang cukup besar dan memberikan tekanan terhadap pemerintahan Korea Selatan atas keputusannya dalam melakukan kerjasama penempatan THAAD.

Pada artikel jurnal ini, Han tidak hanya meninjau mengenai akibat yang didapatkan oleh satu negara saja, namun kerugian juga turut dirasakan oleh Tiongkok. Han menunjukkan data oleh *Pew Research Institute* tentang penurunan kepercayaan publik Korea Selatan terhadap Tiongkok. Artikel jurnal oleh Han memberikan

pemahaman bagi penulis dalam memperoleh informasi mengenai dampak yang diterima oleh dua negara sebagai aktor yang terlibat dan tidak hanya menjelaskan kerugian dari satu sisi saja. Sehingga, melalui hal tersebut penulis mampu menganalisa lebih jauh beberapa dampak yang harus ditanggulangi oleh negara terkait melalui upaya normalisasi hubungan bilateral. Akan tetapi, Han tidak mendeskripsikan bagaimana dinamika perbaikan hubungan bilateral diwujudkan oleh kedua negara.

Dalam melengkapi referensi penulis dalam melihat dinamika lebih lanjut di kawasan Asia Timur dalam keterlibatan Korea Selatan-Tiongkok. Penulis menggunakan referensi pada artikel jurnal berjudul “*The Geopolitics of South Korea-China Relations: Implications for US Policy in the Indo-Pacific*” oleh Lee Ji Young dalam *Experts Insight on a Timely Policy Issue* tahun 2020.¹⁹ Dalam analisisnya, Lee mengidentifikasi berdasarkan peristiwa sejarah kedua negara secara kronologis sehingga peneliti mampu memahami bagaimana dinamika hubungan bilateral keduanya secara runtut melalui setiap kebijakan luar negeri yang dibentuk kedua negara di sistem internasional. Rivalitas dua negara *super power* Amerika Serikat-Tiongkok memberikan posisi yang menyulitkan bagi Korea Selatan. Sejak normalisasi pada tahun 1992 dengan Tiongkok, Korea Selatan memiliki ketergantungan dengan Tiongkok dalam pasar ekspor sebagai sumber PDB terbesar Korea Selatan, disisi lain aliansi keamanan bersama dengan Amerika Serikat turut memberikan posisi yang strategis bagi stabilitas Korea Selatan di tengah ancaman keagresifan Korea Utara.

¹⁹ Ji-Young Lee, “The Geopolitics of South Korea-China Relations: Implications for US Policy in the Indo-Pacific,” *Experts Insight on a Timely Policy Issue*, (2020).

Pada artikel jurnal, Lee mengklasifikasikan bagaimana sifat hubungan yang fluktuatif antara Korea Selatan-Tiongkok ke dalam beberapa fase. Usaha penundukan Semenanjung Korea terhadap rezim komunisme menjadi pertentangan antara Tiongkok-Korea Selatan. Hingga muncul strategi *rebalancing* dari Amerika Serikat di Asia atas penyebaran hegemoni komunisme saat itu. Hingga pada tahun 1970-an, perkembangan ekonomi Korea Selatan yang pesat membuat Tiongkok memulai hubungan “*the door is closed but not locked*” yang merupakan pernyataan dari Huang Hua, Menteri Luar Negeri Tiongkok. Keterbukaan hubungan tersebut berlanjut kepada normalisasi pada tahun 1992 yang memberikan kesempatan baru dalam hubungan keduanya. Disisi aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat hal ini akan memberikan tantangan dengan adanya peran Tiongkok dalam mencapai tujuan unifikasi Korea Selatan atas Korea Utara.

Dinamika hubungan yang positif ini menurun setelah adanya respon apatis dari Tiongkok atas peristiwa penenggelaman Kapal Cheonan di garis batas laut Korea. Korea Selatan menyayangkan komitmen Tiongkok dalam mendukung kemitraan bilateral Korea Selatan-Tiongkok dalam dinamika Semenanjung Korea. Tak hanya itu, sikap apatisme Tiongkok terhadap uji coba peledakan nuklir Korea Utara menambah luka baru bagi Korea Selatan, tak heran pada akhirnya Korea Selatan memperkuat sistem keamanan negaranya dalam kemitraan dengan Amerika Serikat melalui THAAD. Namun, Tiongkok memberikan respon pemberian pembalasan ekonomi atas Korea Selatan yang berdampak pada penurunan nilai perdagangan dan *distrust* antar negara.

Melalui analisis Lee terhadap dinamika hubungan Korea Selatan-Tiongkok tersebut, Lee berpendapat bahwa itu berperan sebagai media ambisi Tiongkok dalam konteks kawasan Asia Timur dan Indo-Pasifik. Hal tersebut dapat dilihat melalui pendekatan Tiongkok mencegah Korea Selatan untuk membuat keputusan yang bertentangan dengan kepentingannya seperti dalam pemberian pembalasan ekonomi dan kesepakatan *Three No's*. Oleh karena itu, dalam melihat bagaimana tindakan Tiongkok dalam sistem internasional melalui kebijakan luar negeri, dibutuhkan sumber referensi lain untuk melengkapi informasi terkait hal tersebut.

Dalam melengkapi informasi dalam melihat arah kebijakan luar negeri Tiongkok, penulis menggunakan artikel jurnal oleh Washeem Ishaque dengan judul "*Analysis of Chinese Foreign Policy of Building Harmonious World; Lessons and Implications for Pakistan*" dalam *Journal of Social Sciences and Humanities* tahun 2017.²⁰ Pokok pembahasan pada artikel ini adalah bagaimana kemajuan pesat Tiongkok yang didasari oleh kebijakan luar negeri yang unik dalam kebersamaan negara tetangga serta motivasi Tiongkok atas pilihan strategi kebijakan yang dibentuk. Tulisan oleh Ishaq dimulai dari strategi kebijakan luar negeri Tiongkok dari fase pertama di masa pemerintahan Deng Xiaoping hingga saat ini, Presiden Xi Jinping.

Ishaq memulai analisisnya dalam melihat kebijakan luar negeri Tiongkok semenjak didirikannya pada tahun 1949. Pada dekade pertama, Tiongkok memiliki ketergantungan akan dukungan politik dan ekonomi kepada Uni Soviet. Lalu, dikarenakan fase Perang Dingin semakin menguat, atas keberpihakan Tiongkok kepada

²⁰ Waseem Ishaque, "Analysis of Chinese Foreign Policy of Building Harmonious World; Lessons and Implications for Pakistan," *Journal of Social Sciences and Humanities* (2017): 93–102.

Uni Soviet membuat Amerika Serikat menganggap Tiongkok sebagai sebuah bentuk ancaman. Tiongkok semenjak itu meyakini bahwa negara-negara Asia yang baru merdeka akan menentang segala bentuk imperialisme yang ada sehingga Tiongkok memulai memperluas ikatannya dengan negara Asia-Afrika yang baru merdeka. Oleh karena itu, prinsip tersebut menjadi landasan kebijakan luar negeri Tiongkok “Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan satu sama lain, saling tidak melakukan agresi, tidak saling ikut campur dalam urusan internal, menjunjung kesetaraan dan saling menguntungkan karena hidup berdampingan secara damai.

Selanjutnya, dalam melihat kebijakan luar negeri Tiongkok pada fase kontemporer, terdapat beberapa prinsip kebijakan yang dalam analisisnya berkaitan dengan landasan awal Tiongkok memproyeksikan kebijakan luar negeri. Pertama, *maintaining independent foreign policy*, Tiongkok tidak memiliki motivasi dalam mengekspansi hegemoni serta berupaya dalam mengeliminasi keterlibatan pihak luar dalam urusan politik internasional. Kedua, *opposition to hegemonic tendencies* berarti Tiongkok menentang keberpihakannya terhadap suatu hegemoni sebab Tiongkok percaya bahwa setiap negara harus terlepas dari ketakutan dan status suatu negara lain dan menjunjung kesetaraan. Ketiga, melalui *five principles of peaceful coexistence*, Tiongkok menjunjung tinggi nilai-nilai bahwa: saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah, hidup berdampingan secara damai, saling tidak menyerang, tidak campur tangan dalam urusan internal satu sama lain, saling menguntungkan dalam kesetaraan, dan hidup berdampingan secara damai. Terakhir, *rectification of historical wrongs*, Tiongkok memiliki dedikasi untuk mengubah kesalahan sejarah yang

berkaitan dengan integritas teritorial serta upaya dalam reunifikasi Taiwan serta kepulauan yang disengketakan.

Dalam analisis oleh Ishaque, penulis tidak menemukan secara spesifik bentuk kebijakan luar negeri Tiongkok yang dibentuk secara khusus pada masa Xi Jinping. Oleh karena itu, dalam melengkapi referensi, penulis menambahkan artikel jurnal oleh Jian Zhang dengan judul “*China’s New Foreign Policy under Xi Jinping: towards ‘Peaceful Rise 2.0’?*” yang dipublikasikan pada *Global Change, Peace & Security* tahun 2015.²¹ Secara umum, Zhang berpendapat bahwa tindakan Tiongkok di sistem internasional merupakan manifestasi dari fase baru kebijakan luar negeri Tiongkok yang didefinisikan sebagai “*Peaceful Rise 2.0*”. Zhang menambahkan bahwa strategi ini merupakan tujuan Tiongkok untuk mempertahankan sistem internasional yang stabil dan kondusif dalam rangka bangkitnya Tiongkok sebagai salah satu negara dengan kekuatan besar. Adapun urgensi penulis dalam mengangkat topik tulisannya adalah peralihan kepemimpinan Tiongkok pada akhir tahun 2012, telah membawa perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Tiongkok. Menurutnya, kebijakan luar negeri Tiongkok saat itu dinilai lebih proaktif, dan dianggap sebagai salah satu periode paling aktif dalam sejarah kebijakan luar negeri Tiongkok.

Berdasarkan perjalanan kebijakan luar negeri Tiongkok, konsep “*Peaceful Rise*” telah dikembangkan pertama kali pada akhir tahun 2003 oleh Zheng Bijian. Seiring berjalannya waktu, melalui “*Peaceful Rise 2.0*”, Beijing berusaha dalam mempertahankan lingkungan eksternal yang stabil dan penting bagi pembangunan

²¹ Jian Zhang, “China’s New Foreign Policy under Xi Jinping: Towards ‘Peaceful Rise 2.0’?,” *Global Change, Peace and Security* 27, no. 1 (2015): 5–19.

Tiongkok yang sudah lama menyembunyikan kemampuan dan menunggu waktu (*taoguang yanghui*) sehingga menjadi lebih percaya diri, proaktif dalam memanfaatkan kekuatan dan pengaruh. Arah kebijakan luar negeri tersebut tidak hanya menjadi sebuah retorika semata, namun terwujud dalam penciptaan proyek utama Tiongkok pada bidang ekonomi seperti OBOR (*One Belt One Road*), AIIB (*Asian Infrastructure Investment Bank*), institusi FTA regional RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*), hingga ASEAN+3.

Akan tetapi, Tiongkok dihadapkan dengan tekanan geopolitik atas sengketa teritorial melalui strategi “*rebalance*” Amerika Serikat. Selain itu, dikarenakan Tiongkok mayoritas berfokus pada diplomasi ekonomi, menyebabkan hal ini tidak dapat membentuk dan mempengaruhi norma-norma politik internasional, serta tidak memiliki kemampuan strategis yang memadai untuk menjadi penyedia keamanan yang kredibel di kawasan. Dengan kata lain, hubungan yang mayoritas pada diplomasi ekonomi Tiongkok tidak cukup kuat dan strategis untuk membangun kepercayaan politik yang kuat antara negara-negara. Hal ini dapat dicontohkan pada Korea Utara yang secara ekonomi bergantung pada Tiongkok, namun kerap melakukan tindakan yang bertentangan dengan Tiongkok seperti aktifnya Korea Utara dalam melakukan uji coba peledakan senjata nuklir disaat dibentuknya *Six Party Talks*.

Selanjutnya penulis menambahkan artikel jurnal dengan judul “*China’s Regional Strategy and Challenges in East Asia*” oleh Joseph Cheng dalam *China Perspectives* tahun 2013,²² untuk memperkaya referensi penulis dalam melihat

²² Joseph Cheng, “China’s Regional Strategy and Challenges in East Asia,” *China Perspectives* 2013, no. 2 (2013): 53–65.

bagaimana kebijakan luar negeri Tiongkok menghadapi tantangan kompleks dalam dinamika kawasan Asia Timur. Dalam penelitian ini, Cheng mengidentifikasi strategi kebijakan luar negeri Tiongkok dalam konteks mengejar status negara dengan pengaruh kekuatan besar. Akan tetapi, dalam tulisannya penulis dapat mengidentifikasi berbagai situasi dan upaya yang dibentuk Tiongkok dalam mengatasi tantangan di kawasan Asia Timur. Hal tersebut didukung dengan pengutipan pendapat oleh Cheng dari Alastair Iain Johnston yang menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok telah semakin terintegrasi dengan komunitas internasional dan semakin kooperatif.

Sejak 2002, melalui Kongres Partai ke-16, Tiongkok menjunjung tinggi prinsip berbuat baik kepada negara tetangga sebagai mitra dengan memperkuat kerjasama di kawasan. Selanjutnya, Hu Jintao pada tahun 2007 melalui Kongres Partai ke-17 menyatakan bahwa Tiongkok menerapkan strategi kawasan perdagangan bebas, memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan bilateral dan multilateral. Oleh karena itu, Tiongkok dengan sangat jelas telah mendefinisikan strategi regionalnya dalam ruang lingkup diplomasi dan ekonomi dalam ruang lingkup kawasan terutama bagi negara tetangga. Ambisi Tiongkok dikerahkan pada partisipasinya dalam institusi regional dengan menginisiasikan beberapa kemitraan bilateral hingga multilateral terutama pada kawasan Asia Timur seperti Six Party Talks yang merupakan negosiasi antara 6 negara (Tiongkok, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Rusia, Amerika Serikat) terkait isu nuklir Korea Utara, menginisiasikan ASEAN+3 sebagai respon krisis keuangan global tahun 1997.

Dalam konteks tantangan di kawasan Asia Timur, Tiongkok harus dihadapi oleh ancaman luar terutama Amerika Serikat, sementara aliansi AS-Jepang telah

menempatkan Jepang dalam kategori yang sama dengan Amerika Serikat sehingga Jepang juga menjadi pesaing yang signifikan di kawasan Asia Timur. Ketidakharmonisan Tiongkok-Jepang disebabkan oleh sejarah masa lalu yang di antara keduanya memiliki pandangan dan nilai yang berbeda dalam konteks nasionalisme. Selain itu, di perkeruh dengan sengketa kepulauan Senkaku/Diaoyu. Maka, kebijakan luar negeri Tiongkok atas Jepang dipertegas Tiongkok sehingga menciptakan situasi rivalitas bagi kedua negara. Tantangan lain muncul disaat ancaman yang dihadapi Korea Selatan: tenggelamnya Kapal Cheonan oleh Korea Utara, penembakan Kapal Yeonpyeong pada tahun 2010, uji coba peledakan nuklir pada tahun 2012 mendorong terjadinya penguatan hubungan keamanan Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan dikarenakan Sixth Party mempertanyakan posisi Tiongkok atas Korea Utara yang tidak membuahkan hasil. Menurut Joshua Cooper Ramo, dalam memproyeksikan strategi *soft power*, Tiongkok mampu menyaingi strategi Amerika Serikat yang hanya mengedepankan kepentingan secara sepihak. Inisiasi kemitraan Tiongkok telah menawarkan inisiasi dalam membimbing negara-negara tetangga dalam mewujudkan kemajuan bersama dalam kepentingan masing-masing melalui *Neighbourhood Diplomacy*.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Kebijakan Luar Negeri

Dalam sistem internasional, dinamika hubungan antar negara dalam ruang lingkup bilateral hingga multilateral ditentukan oleh respon negara terhadap kebijakan luar negeri yang dibentuk oleh suatu negara dalam merespon fenomena global. Secara umum, kebijakan luar negeri bertujuan untuk menentukan dan mengidentifikasi

keputusan, strategi, dan tujuan interaksi negara dengan negara lain. Istilah kebijakan luar negeri telah didefinisikan beragam oleh para ahli. George Modelski mendefinisikan sebagai sebuah sistem perilaku yang dikembangkan oleh komunitas masyarakat dalam tingkat negara untuk menentukan tindakannya atas perilaku negara lain di sistem internasional.²³ Sehingga, Modelski memberikan perhatiannya kepada perubahan perilaku negara yang sewaktu-waktu dapat terjadi dan disesuaikan dengan *status quo* yang berlaku serta kepentingan nasional yang dimiliki.

Terkait dinamika internasional yang harus dihadapi negara, Vladimir Benko mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai sebuah proses dan sistem yang diorganisir oleh negara dengan tujuan untuk memberikan pengaruh atas sistem internasional yang sejalan dengan tujuan politik dan kepentingan nasional.²⁴ Ahli lain, Jack C. Plano dan Roy Olton memberikan perhatiannya dalam mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai suatu strategi negara dalam menghadapi entitas politik internasional lainnya,²⁵ maka Plano dan Olton menjadikan faktor non-domestik sebagai pertimbangan negara dalam memutuskan kebijakan tersebut.

Apabila melihat bagaimana latar belakang yang mendorong pembuat kebijakan suatu negara, Shannon L. Blanton dan Charles W. Kegley dalam buku “*World Politics: Trend and transformation*” menganalisis bagaimana suatu keputusan dalam kebijakan luar negeri dihasilkan.²⁶ Blanton dan Kegley mengklasifikasikan

²³ Laura Neack, *The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era* (Lanham: Rowman & Littlefield Publisher, 2008).

²⁴ Ernest Petric, *Foreign Policy: From Conception to Diplomatic Practice* (Leiden: Martinus Nijhoff, 2013).

²⁵ Jack C. Plano and Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, 3rd ed. (England: Clio, 1979).

²⁶ Shannon Lindsey Blanton and Charles William Kegley, *World Politics Trend and Transformation, 2016-2017*. (Boston: Cengage Learning, 2016), www.cengagebrain.com.

analisisnya terhadap lima determinan atas dua aspek. Pertama yaitu *domestic determinants* yang terdiri dari *military capabilities*, *economic conditions*, dan *type of government*. Sedangkan untuk *global influences* terdiri dari *global distribution of power* dan *geopolitical factors*.

1. Military Capabilities

Kemampuan pertahanan keamanan suatu negara memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan luar negeri agar membentuk keputusan yang efektif, sebab keberadaan konflik yang sewaktu-waktu bisa terjadi tidak dapat dihindari dan diabaikan begitu saja oleh aktor global terutama negara. Blanton dan Kegley berpendapat bahwa kemampuan negara dalam mewujudkan kepentingan nasional akan disesuaikan oleh kemampuan militer yang dimiliki. Kemampuan militer suatu negara akan memberikan batasan maupun peluang tertentu dalam menentukan tindakannya di sistem internasional melalui kebijakan luar negeri.

Pendapat tersebut dibuktikan Blanton dan Kegley melalui fenomena yang terjadi antara Irak dan Amerika Serikat dalam invasi Kuwait atas sumber daya minyak bumi. Ketika Irak di bawah kepemimpinan Saddam Husein yang membangun kekuatan militer Irak sebagai negara dengan kekuatan terbesar keempat saat itu memberikan dorongan bagi negara tersebut untuk menginvasi Kuwait sebagai pilihan kebijakan luar negeri yang dibentuk. Akan tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil dikarenakan Irak harus melawan negara dengan kekuatan militer yang lebih unggul, Amerika Serikat. Bahkan sebaliknya, beberapa tahun kemudian menginvasi Irak dan meruntuhkan kepemimpinan Saddam Husein seketika. Melalui fenomena tersebut dapat diidentifikasi bahwa kekuatan dan kapabilitas militer suatu negara akan menjadi

pertimbangan negara dalam bertindak sebagai respon atas interaksi yang terjadi di sistem internasional.

2. Economic Conditions

J. Morgenthau dalam tulisannya yang berjudul “*The Economics of Foreign Policy*” mengklasifikasikan faktor ekonomi negara sebagai pertimbangan pembuat kebijakan luar negeri atas kekayaan sumber daya alam, kapasitas industri, dan kualitas tipe pemerintahan.²⁷ Hubungan timbal balik yang secara alamiah terjalin antara negara dalam memenuhi kepentingan nasional menjadi alasan mengapa pernyataan tersebut ada. Morgenthau menggambarkan situasi yang terjadi antara negara yang memiliki kekuatan sumber daya alam (*raw material*) berinteraksi dengan negara industrialisasi yang akan saling membutuhkan satu sama lain. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi yang diklasifikasikan oleh Morgenthau menjadi pertimbangan bagi suatu negara dalam bertindak melalui kebijakan luar negeri.

Secara umum, Blanton dan Kegley menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat perkembangan ekonomi suatu negara maka semakin besar dorongan negara tersebut untuk aktif berperan dalam dinamika ekonomi politik global. Negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang melebihi negara lain cenderung untuk menggunakan status quo sebagai negara kuat agar negara yang lebih lemah memenuhi kepentingan mereka guna melindungi dan memperkuat posisi mereka di sistem internasional. Blanton & Kegley menambahkan bahwa negara dengan kekuatan ekonomi yang lebih lemah menanggapi

²⁷ Hans J. Morgenthau, “The Economics of Foreign Policy,” *Challenge* 7, no. 5 (1959): 8–13.

situasi mereka dengan menuruti keinginan negara yang lebih kuat dalam perekonomian guna mempertahankan posisi mereka.

Sehingga dapat diidentifikasi bahwa determinan *Economic Conditions* mendeskripsikan bahwa tingkat perekonomian suatu negara menjadi faktor pendorong dalam perumusan suatu kebijakan. Hal tersebut dapat diidentifikasi dalam posisi antar negara-negara dengan kekuatan ekonomi masing-masing untuk menentukan tindakannya melalui kebijakan luar negeri dalam merespon fenomena global yang berkaitan dengan kepentingan yang dimiliki oleh negara tersebut.

3. Type of Government

Determinan selanjutnya yang mempengaruhi kebijakan luar negeri adalah jenis sistem politik pemerintahan negara. Blanton dan Kegley memusatkan perhatiannya pada perbedaan antara pemerintahan dengan tipe demokrasi konstitusional dengan tipe pemerintahan otokratis. Pada negara demokratis, pertimbangan dalam memutuskan suatu kebijakan luar negeri dinilai lebih kompleks dan mampu menyebar kepada instrumen domestik lainnya. Hal tersebut dicontohkan pada bagaimana peran opini publik yang menggerakkan suara massa, kelompok kepentingan, serta media massa yang secara langsung maupun tidak akan membingkai pilihan negara dalam menentukan kebijakan yang relevan dan efektif. Sebaliknya, sifat yang tertutup dalam negara yang otokratis tidak memerlukan tahapan yang lebih panjang, namun hanya ditentukan oleh segelintir elit di balik pintu tertutup. Sehingga, lingkungan politik domestik yang dihadapi suatu pemerintahan negara akan berpengaruh secara signifikan dalam perumusan suatu kebijakan.

4. *Global Distribution of Power*

Para ahli hubungan internasional mendefinisikan distribusi power kedalam sistem polaritas dunia. Secara umum, sistem polaritas dunia dibedakan atas unipolar dengan distribusi kekuatan tunggal dunia, bipolar dengan distribusi kekuatan yang dibagi atas dua bagian, dan multipolar dengan distribusi kekuatan lebih dari dua pusat kekuatan. Polarisasi seperti ini mengindikasikan bagaimana negara-negara menempatkan keberpihakannya atas kekuatan tertentu sehingga membentuk aliansi. Blanton dan Kegley menyatakan bahwa fenomena “*the rise of China*” membawa perubahan terhadap polarisasi dunia dengan rivalitasnya atas Amerika Serikat. Sehingga, dalam perumusan kebijakan luar negeri, negara-negara yang memiliki kepentingan berbeda harus menempatkan arah kebijakannya dan menyesuaikan dengan dua kekuatan saat ini.

Terkait distribusi kekuatan global, keberadaan istilah *influence* atau pengaruh berperan signifikan dalam hal ini. Robert Dahl berpendapat bahwa pengaruh dalam hal ini sama halnya dengan sifat manusia dimana keinginan, preferensi atau niat tertentu akan mempengaruhi tindakan serta kecenderungan untuk bertindak konsisten sehingga tidak bertentangan dengan aktor pemegang pengaruh yang lebih besar.²⁸ Dalam sebuah tulisan “*Understanding the Mechanism of International Influence*” menyatakan bahwa para ahli menyoroti keberadaan Tiongkok di sistem internasional dalam memproyeksikan kekuatannya sehingga mampu memberikan pengaruh dalam konteks distribusi kekuatan global.

²⁸ Robert A. Dahl and Bruce Stinebrickner, *Modern Political Analysis*, sixth. (New Jersey: Prentice Hall, 2003).

5. Geopolitical Factors

Istilah geopolitik secara umum melihat dari posisi geografis negara yang dapat memberikan keuntungan ataupun hambatan baginya dalam menentukan kebijakan luar negeri, namun seiring berkembangnya ilmu hubungan internasional banyak ahli telah mendefinisikan beragam terkait istilah ini. Ahli geopolitik seperti Sir Halford Mackinder dan Nicholas Spykman berpendapat bahwa geopolitik memiliki elemen yang beragam di antaranya adalah topografi ukuran, iklim, serta jarak antara negara menjadi penentu dalam suatu negara bertindak atas sistem internasional. Blanton dan Kegley memberikan gambaran pada posisi Amerika Serikat yang dipisahkan oleh samudera luas atas kawasan Asia dan Eropa sehingga menjadikan negara ini menjalankan politik isolasionis selama lebih dari 150 tahun tanpa adanya negara tetangga yang kuat.

Sebagai rivalitas baru bagi Amerika Serikat, Tiongkok telah memanfaatkan posisi geopolitik dalam menjalankan visi *Asia Dream*.²⁹ Visi tersebut dapat dilihat melalui ambisi Tiongkok atas beberapa agenda seperti “*One Belt, One Road*”, “*New Asian Security Concept*”, “*Neighbourhood Diplomacy*”. Lebih spesifik, keberadaan Korea Selatan dimanfaatkan sebagai negara yang diharapkan mampu mendukung proyeksi strategi kebijakan luar negeri Tiongkok dalam konteks geopolitik di kawasan Asia Timur.

²⁹ David Arase, *The Geopolitics of Xi Jinping's Chinese Dream: Problem and Prospects*, vol. 15 (Singapore: ISEAS, Yusuf Ishak Institute, 2016).

1.8 Metode Penelitian

Dalam upaya mendapatkan pengetahuan dari topik penelitian yang akan diteliti, diperlukan sebuah prosedur dan prinsip guna mengkaji sebuah fenomena dalam kajian hubungan internasional, hal tersebut dinamakan dengan metodologi penelitian.

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan jenis pendekatan yang bersifat kualitatif. Pada penelitian ini, akan menjelaskan bagaimana suatu realitas dipahami melalui pengamatan atas proses dari suatu peristiwa dan intensitas.³⁰ Selain itu, dari penelitian kualitatif ini akan dihasilkan temuan yang tidak dapat terkuantifikasi atau dihitung dengan suatu ukuran mutlak.³¹ Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian deskriptif-analitis. Jenis penelitian ini akan dijelaskan secara deskriptif terkait isu yang dikaji melalui tindakan negara sebagai motivasi dalam membentuk kebijakan luar negeri. Penulis menggunakan jenis penelitian ini agar mampu menjawab masalah penelitian dalam mengkaji motivasi kebijakan luar negeri Tiongkok dalam memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAAD.

1.8.2 Batasan Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan tetap berada pada fokus utamanya dan tidak merambah kepada bahasan fenomena yang lain, maka penulis menetapkan batas pada penelitian ini sejak awal terjadinya polemik THAAD pada tahun 2016 hingga

³⁰ Mohtar Mas'oeid, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (Penerbit PT Pustaka LP3ES, 1994). 39.

³¹ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

tercapainya kesepakatan *Three No's* oleh kedua negara pada tahun 2017. Periode waktu ini dipilih karena sesuai dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian dalam melihat motivasi Tiongkok memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAAD. Tahun 2016 merupakan tahun kedua negara menghadapi polemik THAAD yang memperburuk hubungan bilateral keduanya, yang kemudian polemik berakhir dengan dibentuknya kesepakatan *Three No's* pada tahun 2017.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Menurut Mohtar Mas'ood, unit analisis dalam metode penelitian merupakan objek yang tindakannya akan dideskripsikan dan dianalisis,³² dalam istilah lain unit analisis juga disebut sebagai variabel dependen. Unit analisis dari penelitian ini yaitu hubungan bilateral antara Korea Selatan-Tiongkok. Sedangkan unit yang berdampak terhadap unit analisis yang hendak diamati disebut sebagai unit eksplanasi, dalam istilah lain unit eksplanasi juga dikenal dengan variabel independen.³³ Variabel independen berperan penting dalam menjelaskan perilaku dari objek yang akan dideskripsikan sebagai unit analisis. Maka, unit eksplanasi dari penelitian ini adalah polemik THAAD yang terjadi antara Korea Selatan-Tiongkok pada tahun 2016.

Level analisis merupakan tingkatan objek yang menjadi fokus utama dalam pembahasan sebuah penelitian.³⁴ Dalam penelitian ini objek yang menjadi level adalah level sistemik. Berdasarkan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian, motivasi

³² Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*. 36.

³³ Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*. 36.

³⁴ Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*. 41.

Tiongkok dalam memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAAD menjadi permasalahan yang akan menjadi analisis utama. Sehingga dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana posisi Tiongkok sebagai negara yang membentuk kebijakan luar negeri dihadapkan dengan negara-negara yang terlibat sesuai dengan pertanyaan penelitian.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data yang diambil menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau *library research*. Studi kepustakaan merupakan sebuah teknik pengumpulan data dari sumber literatur akademik/ilmiah berupa buku, artikel jurnal, majalah, situs resmi suatu pemerintahan, dan sebagainya. Dalam pengumpulan data sekunder, penulis menggunakan beberapa situs resmi pemerintahan guna melihat informasi resmi terkait kebijakan luar negeri, *press release*, dan sebagainya yang didapatkan melalui *Ministry of Foreign Affairs of People's Republic of China* (<https://fmprc.gov.cn/>), *Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea* (<https://mofa.go.kr/>), *Ministry of Foreign Affairs of Japan* (<https://mofa.go.jp/>), serta *Ministry of Commerce of People's Republic of China* (<https://mofcom.gov.cn/>).

Untuk mengumpulkan data pada aspek pertahanan dan keamanan, terkait persenjataan nuklir, THAAD, strategi keamanan luar negeri akan diperoleh melalui *U.S Department of Defense* (<https://defense.gov/>), *MDDA (Missile Defense Advocacy Alliance)* (<https://missiledefenseadvocacy.org/>), dan *NTI (Nuclear Threat Initiative)* (<https://nti.org/>). Selain itu, data terkait perekonomian, perdagangan bilateral akan diperoleh melalui situs *WITS (World Integrated Trade Solutions) World Bank*

(<https://wits.worldbank.org/>), OEC (*The Observatory of Economy Complexity*) (<https://oec.world/>), dan sejenisnya.

Dalam kebutuhan penelitian, penulis mengumpulkan data sekunder lainnya dengan menggunakan sumber buku “*World Politics: Trend & Transformation*” pada tahun 2017, “*Chinese Foreign Policy: An Introduction*” oleh Marc Lanteigne pada tahun 2016, “*East Asian Regionalism*” oleh Christopher M. Dent pada tahun 2017. Selain itu, penulis juga menggunakan artikel jurnal yang dijadikan sebagai sumber referensi dalam memperoleh data terkait penelitian di antaranya “*Resetting the South Korea-China Relationship: the THAAD Controversies and Their Aftermath*” oleh Sukhee Han tahun 2019 yang memuat informasi terkait bagaimana dinamika perbaikan hubungan bilateral Korea Selatan-Tiongkok pasca polemik THAAD. Selanjutnya “*China’s Regional Strategy and Challenges in East Asia*” oleh Joseph Cheng tahun 2013 tentang bagaimana strategi Tiongkok menghadapi tantangan di kawasan Asia Timur. Artikel jurnal oleh Jian Zheng “*China’s New Foreign Policy Under Xi Jinping: towards ‘Peaceful Rise’?*” pada tahun 2015 yang memuat tentang kebijakan luar negeri Tiongkok di bawah pemerintahan Xi Jinping dengan prinsip perdamaian global.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis, dibutuhkan proses organisasi data guna memperoleh pola dan membentuk keteraturan.³⁵ Tahapan tersebut membutuhkan interpretasi data dalam menjelaskan pola-pola melalui analisis data, sehingga mampu memberikan gambaran informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Secara

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018).

umum, penulis akan menganalisis data-data sekunder yang telah dikumpulkan dengan fokus analisis dalam melihat motivasi Tiongkok dalam memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAAD menggunakan kerangka pemikiran *rational choice model* dalam pembentukan kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Shannon L. Blanton dan Charles W. Kegley. Berdasarkan tulisan yang dikemukakan oleh Miles, dan Huberman terdapat tiga tahapan dalam menganalisis data penelitian kualitatif di antaranya yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.³⁶

1. Kondensasi Data

Tahapan ini akan dilakukan pemilahan data yang diperoleh melalui sumber empiris dan kemudian disederhanakan. Berdasarkan penelitian ini, penulis mengelompokkan data yang akan diperoleh dalam beberapa bagian. Data tersebut dikelompokkan kedalam kategori polemik yang timbul akibat penempatan sistem keamanan anti rudal balistik di Korea Selatan, dinamika Tiongkok di kawasan Asia Timur secara khusus dalam hubungan bilateral dengan Korea Selatan, serta motivasi kebijakan luar negeri Tiongkok yang pada akhirnya memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAAD.

2. Penyajian Data

Secara umum, penyajian data dilakukan dengan penyusunan data-data yang telah diperoleh sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan atas fenomena-fenomena tertentu. Dalam menganalisis penyebab fenomena hubungan bilateral Korea

³⁶ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Sage Publications, 2014).

Selatan-Tiongkok yang kembali menghadapi situasi normal pasca terjadinya polemik THAAD melalui motivasi kebijakan luar negeri Tiongkok, akan disajikan data-data tentang arah kebijakan luar negeri Tiongkok melalui peristiwa sejarah Tiongkok dalam sistem internasional, pernyataan para pembuat kebijakan di masa pemerintahan presiden Xi Jinping serta berbagai situasi dalam level sistemik yang dihadapi Tiongkok dalam konteks kawasan Asia Timur.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Setelah melalui kedua tahapan dalam melakukan analisis data, penulis akan melakukan operasionalisasi kerangka konsep yang telah ditentukan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan melakukan proses verifikasi terhadap hasil penelitian secara aktual untuk memastikan bahwa kerangka pemikiran dan hasil analisis mampu menjawab pertanyaan penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan dideskripsikan secara menyeluruh mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka dari literatur terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan, kerangka konseptual sebagai alat analisis data, metodologi penelitian yang diklasifikasikan atas jenis penelitian, batasan masalah, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II Tiongkok dalam Dinamika Kawasan Asia Timur

Pada bagian ini akan dideskripsikan bagaimana posisi Tiongkok dalam dinamika kawasan Asia Timur. Keterlibatan aktif Tiongkok dalam berbagai isu di kawasan akan dijelaskan pada bab ini melalui deskripsi pada tantangan di tingkat kawasan dan kemitraan strategis dengan Korea Selatan secara khusus. Dalam perkembangannya telah membawa Tiongkok pada situasi yang naik turun dalam hubungannya dengan negara lain di kawasan. Sehingga bab ini akan turut menjelaskan bagaimana respon Tiongkok melalui kebijakan luar negeri dalam menghadapi dinamika kawasan Asia Timur sebagai kajian dalam tingkat sistemik.

BAB III Sistem Keamanan THAAD (*Terminal High Altitude Area Defense*) dalam Polemik Korea Selatan-Tiongkok

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana sistem keamanan anti rudal balistik THAAD sebagai bentuk kemitraan pada bidang keamanan antara Amerika Serikat-Korea Selatan. Kronologi mengenai penempatan THAAD di Korea Selatan yang mengakibatkan polemik antara Korea Selatan-Tiongkok turut dijelaskan pada bab ini. Deskripsi secara rinci akan dilakukan dalam melihat fenomena sebab-akibat dari polemik yang terjadi, respon kedua negara, serta dampak yang ditimbulkan hingga

akhirnya mencapai titik kesepakatan untuk memperbaiki hubungan bilateral antara Korea Selatan-Tiongkok.

BAB IV Motivasi Tiongkok Memperbaiki Hubungan Bilateral dengan Korea Selatan Pasca Polemik THAAD

Pada bagian ini akan dideskripsikan analisis penulis melihat motivasi Tiongkok terkait perbaikan hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAAD. Analisis pada bab ini akan dijelaskan melalui determinan kebijakan luar negeri oleh Shannon L. Blanton & Charles W. Kegley dalam buku “*World Politics: Trend and transformation*”. Teori ini mengidentifikasi determinan dalam memutuskan kebijakan luar negeri. Beberapa indikator tersebut di antaranya *Military Capabilities, Economic Conditions, Type of Government, Global Distribution of Power* dan *Geopolitical Factors*. Tiap indikator digunakan untuk mengidentifikasi motivasi Tiongkok memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan pasca polemik.

BAB V Penutup

Merupakan bagian terakhir dari tulisan ini mencakup kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.